Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di zaman reformasi yang berlangsung saat ini di Indonesia masyarakat menuntut agar pemerintah mampu mengelola otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Perkembangan teknologi saat ini juga menuntut pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut. Masyarakat sebagai pihak pemberi amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggung jawaban yang dilakukan di dalam suatu instansi dimana pihak yang berkepentingan harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dia lakukan dan dia kerjakan, sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP nomor 12 Tahun 2019). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Pemerintah diminta untuk

melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terkait dengan aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tangungjawabnya melalui penyajian laporan keuangan, dimana masyarakat mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran serta pelaporan anggaran secara penuh. Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, dalam hal ini laporan yang mengandung informasi relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. (Sumiyanti, 2015)

Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Dengan adanya laporan realisasi tersebut masyarakat dapat melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah (Superdi, 2017). Akuntabilitas pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

menjadi fokus utama masyarakat karena akuntabilitas dapat mencegah terjadinya praktek korupsi seperti yang terjadi, karena itu akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar.

Akuntabilitas Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel menuntut pemerintah menyusun serta menyajikan laporan keuangan publiknya sesuai pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam SAP No. 01 menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah tetapi yang paling penting penyajian laporan keuangan pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap masyarakatnya sebagai sumber dana. Tujuan–tujuan itulah yang menyebabkan diperlukannya sebuah standar yang paling tidak harus dimiliki oleh laporan yang dibuat pemerintah, standar ini juga memuat pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Persyaratan minimum yang harus dipenuhi laporan keuangan pemerintah paling tidak adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Mulyanto, 2020)

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menggunakan sumber dana publik sehingga harus memberikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik dari laporan keuangan (Nurlaili, 2016)

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Penyajian Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah, yang paling bertanggungjawab atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah Gubernur/Bupati/Walikota. Namun, perlu untuk dipahami bahwa LKPD merupakan *output* dari suatu sistem akuntansi yang tidak terlepas dari siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran (penyusunan Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), pelaksanaan APBD, pengawasan sampai kepada pertanggungjawaban APBD, sehingga untuk menguraikan secara komprehensif penyebab dari dihasilkannya suatu opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD. (Dewi,2018)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Riau memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Riau. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut diraih Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak empat kali berturut-turut sejak tahun 2016.

Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Hasil Pemeriksaan BPK adalah salah satu hal yang menggambarkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut (Lily, 2015).

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Akuntabilitas yang efektif juga tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Sehingga pemerintah selain menyajikan laporan keuangan juga harus memberikan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara memberikan fasilitas kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan agar mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Fauziyah, 2018).

Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan dearah. Pernyataan pemerintah yang dimuat dalam Undang - Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah, pasal 103 dinyatakan bahwa data terbuka yang dapat diketahui, informasi yang diakses dan diperoleh oleh masyarakat dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, Pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Nurlaili (2016), *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Bengkalis).* Hasil dari penelitian ini yaitu variabel penyajian laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan variabel aksesibilitas secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Semakin baik laporan keuangan daerah dan kemudahan akses kepada para pengguna laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan terwujud.

Superdi (2017), *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunung).* Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa penelitian penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik laporan keuangan, aksesibilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Dewi (2018), *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.* Hasil penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang kurang baik akan mendorong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

penurunan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan semakin tingginya tingkat aksesibilitas laporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari beberapa penelitian yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mereview penelitian dari Nurlaili (2016), Superdi (2017) dan Dewi (2018). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian , variabel penelitian, dan tahun penelitian yaitu pada tahun 2021. Alasan penulis memilih judul ini karena adanya inkonsistensi terhadap hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai objek penelitian karena peneliti ingin mengetahui seberapa baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyajikan laporan keuangan, peneliti juga ingin mengetahui seberapa mudahnya akses laporan keuangan daerah bagi masyarakat umum dan juga untuk mengetahui seakuntabel apa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Riau selama 4 tahun berturut- turut sejak 2016.

Berdasarkan pada uraian yang dijelaskan, penulis ingin mengangkat dan mengambil judul mengenai : **PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitasi pengelolaan keuangan daerah ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Menguji dan membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Menguji dan membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah

Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

b. Bagi Akademisi

Sebagai kontribusi bagi pihak akademisi untuk memahami aksesibilitas laporan keuangan yang merupakan penyebab dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir.

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

e. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

1.4. Sistematika Penulisan

Penulis menguraikan secara singkat isi masing – masing bab, yang akan dipaparkan dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan lingkup yang mendukung konsep-konsep dan landasan teori yang terdiri dari selanjutnya diuraikan tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesisi peneltian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini mendiskripsikan hasil penelitian dan pembahasanya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.